

PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, DAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Warisa El Jannah
warisaeljannah03@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Disclosure of Regional Government Financial Reports (PLKPD) is the process of presenting transparent and accountable financial information regarding the financial condition of a local government. This research aims to examine the effect of intergovernmental revenue, the ratio of regional independence, and regional wealth on the disclosure of regional government financial reports (LKPD). The study applies quantitatively. Furthermore, the data were secondary in the form of financial statements of local governments. The data collection technique used saturated sampling i.e., a sample determination when all members of the population were used as the sample. In line with that, 38 districts or cities in East Java Province were taken as samples. Moreover, the data were gained during 1 year in 2023 therefore it obtained 38 data samples. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. The result shows that both intergovernmental revenue and regional independence ratio have a positive and significant effect on the Disclosure of Regional Government Financial Reports (PLKPD). However, regional wealth has a positive but insignificant effect on the disclosure of Regional Government Financial Reports (PLKPD).

Keywords: intergovernmental revenue, regional independence ratio, regional wealth, and the Disclosure of Regional Government Financial Reports (PLKPD)

ABSTRAK

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PLKPD) merupakan proses penyajian informasi keuangan yang transparan dan akuntabel mengenai kondisi keuangan suatu pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue*, rasio kemandirian daerah, dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. proses pengambilan sampel menggunakan metode *saturation sampling* (sampel jenuh) yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan metode *saturation sampling*, didapatkan sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Data penelitian diambil selama 1 tahun, yaitu tahun 2023, sehingga diperoleh 38 data yang diolah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* dan rasio kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kekayaan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Intergovernmental Revenue*, Rasio Kemandirian Daerah, Kekayaan Daerah, Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

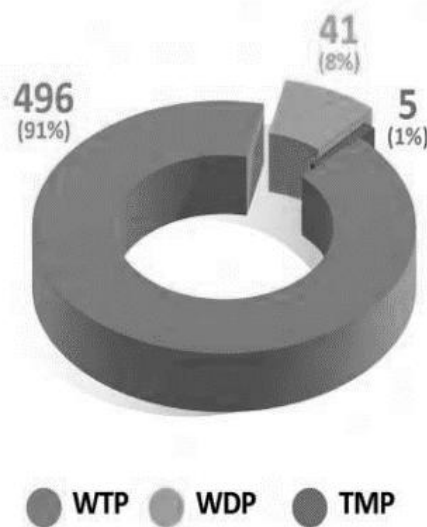
PENDAHULUAN

Akuntansi Sektor Publik (ASP) adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang mempunyai peranan strategis dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Mardiasmo (2018: 2), istilah "sektor publik" sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Saat ini, masyarakat semakin

menuntut pengelolaan keuangan publik yang transparan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasal 34-40 PP tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Cara agar mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yaitu disampaikannya laporan pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan. Sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, laporan keuangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah harus diaudit. Audit laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan serta sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Namun di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam pengungkapan LKPD. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena minimnya informasi dalam laporan perekonomian daerahnya.

Pada semester 1 tahun 2023, BPK memeriksa 542 (100%) LKPD Tahun 2022 dari 542 PEMDA yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2022. Sejak tahun 2015, seluruh PEMDA telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2022, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 496 (91%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 41 (8%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 5 (1%) LKPD seperti terlihat dalam Gambar 1.



Gambar 1
Opini LKPD Tahun 2022

Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>

Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 379 dari 415 pemerintah kabupaten (91%), dan 85 dari 93 pemerintah kota (91%). Capaian opini pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024 masing-masing sebesar 93% dan 82% di tahun 2022, sedangkan capaian opini pemerintah kota (pemkot) tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan opini LKPD Tahun 2022 pada pemprov dari 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD dan

pada pemkot dari 89 (96%) menjadi 85 (91%) LKPD. Daftar LKPD yang mengalami penurunan opini disajikan pada Gambar 2.

Opini WTP menjadi WDP	
1. Pemkab Padang Lawas	10. Pemkab Pangandaran
2. Pemkot Binjai	11. Pemkot Bandung
3. Pemkab Kerinci	12. Pemkab Pematang
4. Pemkab Ogan Ilir	13. Pemkab Sumbawa
5. Pemkot Pagar Alam	14. Pemkab Kapuas
6. Pemkot Palembang	15. Pemkab Kolaka Timur
7. Pemkab Kaur	16. Pemkab Kepulauan Tanimbar
8. Pemkab Tanggamus	17. Pemprov Maluku Utara
9. Pemkab Bekasi	18. Pemprov Papua
Opini WTP menjadi TMP	
1. Pemkab Kepulauan Meranti	

Gambar 2
Daftar LKPD yang Mengalami Penurunan Opini
Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>

Dari fenomena diatas, baik pemprov maupun pemkot perlu melakukan berbagai upaya perbaikan agar capaian opini WTP dapat ditingkatkan atau dipertahankan di masa yang akan datang. Peran BPK khususnya melalui pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pun perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar BPK dapat terus mengawal dan mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah *Intergovernmental Revenue* atau Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. Menurut Jessica dan Suhartono (2020) *intergovernmental revenue* menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau provinsi untuk membiayai kebutuhan daerah. *Intergovernmental revenue* ini berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana perimbangan dari provinsi. Daerah yang memiliki pendapatan *intergovernmental revenue* yang tinggi cenderung memiliki pengungkapan laporan keuangan yang lebih baik, karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk dikelola.

Selain itu, Rasio Kemandirian Daerah juga memiliki peran penting. Menurut Suryantini *et al.* (2017) rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian menandakan arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Kekayaan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan Daerah yang mencakup aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, juga menjadi faktor penting dalam pengungkapan laporan keuangan. Menurut Aziz dan Kusumawati (2024) tingginya tingkat kekayaan daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berjalan dengan baik.

Dengan memahami pengaruh faktor-faktor tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan. Upaya untuk meningkatkan *intergovernmental revenue* dan rasio kemandirian daerah harus diimbangi dengan pengelolaan kekayaan daerah yang baik. Semua ini bertujuan untuk mencapai

pengungkapan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabilitas. Pengungkapan yang baik pada akhirnya akan membawa manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD?, (2) Apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD?, (3) Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan LKPD, (2) Untuk menguji pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap pengungkapan LKPD, (3) Untuk menguji pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan LKPD.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency Theory atau Teori Agensi diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 dalam karya mereka yang berjudul "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Teori ini membahas hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) yang dihadapkan pada konflik kepentingan. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat (prinsipal) mengharapkan pemerintah daerah (agen), untuk mengelola sumber daya publik dengan cara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi sangat penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga teori agensi memberikan kerangka untuk memahami dinamika antara pemangku kepentingan dan pemerintah.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pengungkapan atau *disclosure*, merupakan proses di mana informasi penting dan relevan disampaikan kepada publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah, pengungkapan ini mencakup informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan pengelolaan sumber daya publik. Pengungkapan yang baik memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menggunakan dana publik dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengawasan terhadap pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berperan penting sebagai sarana untuk menyampaikan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat. LKPD terdiri dari berbagai komponen, termasuk neraca, laporan realisasi anggaran, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan pengungkapan yang jelas dan terperinci, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan.

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue atau dana perimbangan merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah lain. Pendapatan ini biasanya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keuangan pemerintah daerah dan dapat berdampak pada pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Definisi ini menekankan bahwa pendapatan ini berasal dari sumber eksternal dan diberikan dengan tujuan mendukung aktivitas pemerintahan atau memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di tingkat yang lebih rendah dari struktur pemerintahan. Pendapatan yang tinggi dari *intergovernmental revenue* dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam pengungkapan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana.

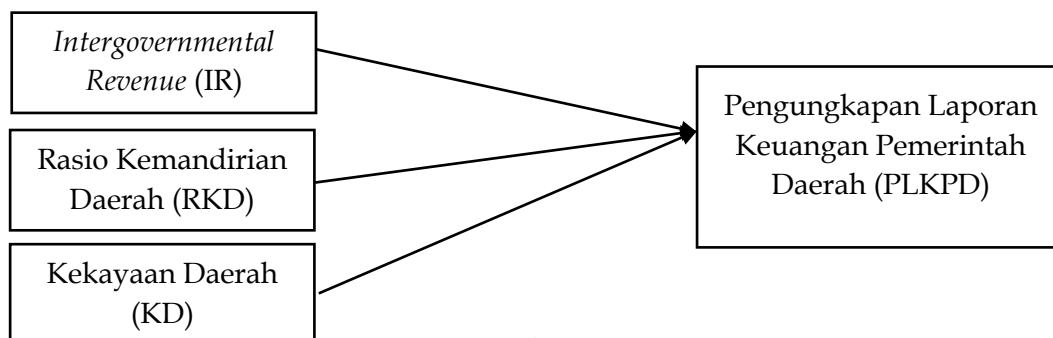
Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dan pengeluarannya sendiri tanpa harus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin besar insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan LKPD sebagai bentuk komitmen dalam mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Selain itu, rasio ini dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, peningkatan kemandirian daerah menjadi salah satu tujuan penting dalam pembangunan regional.

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah meliputi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk yang berwujud dan yang tidak berwujud. Kekayaan ini mencerminkan potensi ekonomi daerah dan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa kekayaan daerah dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah eksploitasi berlebihan. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan lebih besar umumnya lebih cenderung memberikan pengungkapan LKPD yang lebih baik, sebab mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan secara lebih efektif dan efisien.

Rerangka Konseptual



Gambar 3
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Jika suatu daerah menerima dana dari sumber intergovernmental, maka diharapkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara transparan. Hasil penelitian Rafida, Abdullah, dan Yamin (2019); Sani (2022); dan Setyorini (2020) mengungkapkan adanya pengaruh positif pada *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang didorong oleh alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ketika pemerintah daerah menerima pendapatan dari sumber *intergovernmental*, mereka cenderung untuk lebih terbuka dalam menyajikan informasi keuangan kepada publik.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁: *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Rasio kemandirian daerah menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mampu membiayai kebutuhan dan belanjanya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan suatu daerah pada sumber pendanaan eksternal. Hasil penelitian Dianti dan Herawati (2022) dan Suladri (2019) mengungkapkan adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Arza (2019) dan Setyorini (2020), yaitu rasio kemandirian daerah yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintah daerah yang lebih kaya cenderung menunjukkan tingkat pengungkapan laporan keuangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin besar kekayaan daerah maka menunjukkan sinyal yang baik mengenai kualitas manajemen yang baik dalam hal di pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Setyorini (2020) menemukan adanya pengaruh positif antara kekayaan daerah dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian oleh Rafida, Abdullah, dan Yamin (2019) juga menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Arza (2019) juga mengungkapkan adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk deskriptif dan analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Gambaran populasi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang, penelitian, sehingga peneliti mampu menjelaskan dengan akurat kepada pembaca mengenai subjek penelitian, alasan pemilihan mereka, dan bagaimana hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2023.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *saturation sampling* (sampel jenuh) yaitu pengambilan sampel jika seluruh populasi digunakan sebagai sampel dan tidak ada perubahan karakteristik pada sampel. Jadi dari penjelasan teknik sampel di atas penulis tidak menentukan sampel, karena seluruh populasi akan diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD pada 38 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Data diperoleh langsung dari Situs Web BPK RI Jawa Timur (<https://jatim.bpk.go.id/>) yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berasal dari laporan keuangan resmi pemerintah daerah. Data ini diperoleh langsung dari (<https://jatim.bpk.go.id/>) yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan dalam penelitian. Sumber data yang diperoleh adalah berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang diperoleh dari situs resmi BPK RI.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variable Dependen

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Untuk mengevaluasi sejauh mana pengungkapan LKPD telah dilakukan, dapat dilakukan perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2020, karena mengadopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) sebagai acuan utama. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pengungkapan LKPD} = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam SAP}}$$

Variable Independen

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya sebagai bagian dari sistem transfer fiskal. Variabel ini melibatkan perbandingan antara dana perimbangan dengan pendapatan. Dalam penelitian ini, *intergovernmental revenue* (IR) diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pengeluarannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Indikator ini melibatkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan. Dalam penelitian ini, Rasio Kemandirian Daerah (RKD) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merupakan keseluruhan nilai dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, yang mencakup asset fisik, sumber daya alam, dan infrastruktur. Dalam penelitian ini, variabel kekayaan daerah menggunakan *natural log* total aset sebagai proksi karena total aset merupakan jumlah keseluruhan nilai dari semua asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Kekayaan Daerah (KD) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Ln Total Aset}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Skewness dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data dalam suatu penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal memiliki nilai skewness dan kurtosis mendekati nol (0). Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum dan nilai sum merupakan penjumlahan dari seluruh responden (Ghozali, 2018: 21).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel *pengganggu atau residual* memiliki distribusi normal (Ghozali 2018: 161). Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan untuk uji statistik metode yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Metode ini membandingkan distribusi sampel dan distribusi normal. Jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari tingkat alfa yang ditentukan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data dapat dianggap terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali 2018: 108).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test), yang mengukur sejauh mana nilai residual dari model regresi saat ini berkorelasi dengan nilai residual sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018: 112). Dengan melakukan uji Durbin-Watson, peneliti dapat memastikan bahwa asumsi independensi residual terpenuhi, yang penting untuk validitas dan keandalan hasil analisis regresi. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

HA : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Tabel 1
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol (0)	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: (Ghozali 2018: 112)

Keterangan:

d : durbin - watson

du: durbin - watson upper (batas atas d)

dl : durbin - watson lower (batas bawah d)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, menggunakan Grafik Plot antara ZPRED (nilai prediksi variabel terikat) dan SRESID (residual) sebagai cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Selain menggunakan Scatterplot, dapat juga dengan menggunakan Uji Glejser. Dalam suatu penelitian, dikatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai sig>0,05.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, alat analisis data atau *software* yang dipakai adalah program SPSS. Berikut persamaan regresi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$PLKPD = \alpha + \beta_1IR + \beta_2RKD + \beta_3KD + e$$

Keterangan:

PLKPD : Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

IR : *Intergovernmental Revenue*

RKD : Rasio Kemandirian Daerah

KD : Kekayaan Daerah

e : *Error*

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model merupakan proses evaluasi untuk menentukan apakah model yang digunakan dalam sebuah penelitian tersebut layak untuk diuji lebih lanjut atau tidak. Interpretasi hasil uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan F dengan 0,05: (1) Jika nilai signifikan F < 0,05, artinya model regresi layak untuk diuji lebih lanjut, (2) Jika nilai signifikan F > 0,05, artinya model regresi tidak layak dan tidak dapat untuk diuji lebih lanjut.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 2018: 97).

Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R² negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol (0). Secara matematis, jika nilai R² = 1, maka adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika nilai R² = 0, maka adjusted R² = (1 - k)/(n - k). jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai negatif.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 99). Dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria dari uji statistik t adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, (2) Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai karakteristik suatu kumpulan data. Statistik deskriptif ini dapat dilihat dari jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PLKPD	38	.474	.641	.50607	.036352
IR	38	.267	.793	.61263	.089954
RKD	38	.106	.601	.20289	.092836
KD	38	28.333	31.610	29.16059	.653146
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

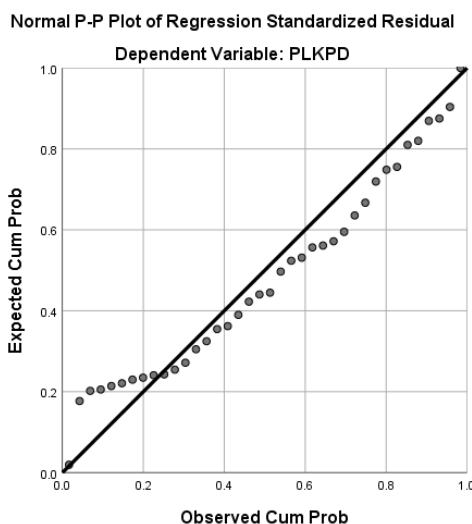
Berdasarkan hasil dari Tabel 2, jumlah sampel (N) pada statistik deskriptif diatas berjumlah 38. (1) Hasil perhitungan variabel Pengungkapan LKPD menunjukkan nilai minimum 0,474 dan nilai maksimum 0,641. Rata-rata (*mean*) 0,50607, dengan standar deviasi

0,036352 yang dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai PLKPD cukup homogen, artinya tidak memiliki variasi yang signifikan dalam pengungkapan laporan keuangan mereka, (2) Hasil perhitungan variabel *Intergovernmental Revenue* (IR), nilai minimum dan nilai maksimum yang diperoleh adalah 0,267 dan 0,793 dengan rata-rata (*mean*) mencapai 0,61263. Standar deviasi sebesar 0,089954 menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan. Rata-rata (*mean*) yang tinggi menunjukkan bahwa banyak daerah memiliki pendapatan *intergovernmental* yang baik, yang dapat berkontribusi pada pengungkapan LKPD yang lebih baik, (3) Hasil perhitungan variabel Rasio Kemandirian Daerah (RKD), nilai minimum 0,106 dan maksimum 0,601, dengan rata-rata (*mean*) 0,20289. Nilai rata-rata (*mean*) yang rendah, ditambah dengan standar deviasi 0,092836, menunjukkan bahwa banyak daerah masih bergantung pada sumber pendapatan dari luar dan belum mencapai kemandirian yang optimal, (4) Hasil perhitungan variabel Kekayaan Daerah (KD), nilai minimum dan nilai maksimum adalah antara 28,333 dan 31,610, dengan rata-rata (*mean*) 29,16059. Standar deviasi sebesar 0,653146 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam nilai kekayaan daerah. Rata-rata (*mean*) yang lebih tinggi menandakan bahwa sebagian besar daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pengungkapan LKPD yang lebih baik. Namun, variasi yang signifikan juga menunjukkan perbedaan mencolok antara daerah kaya dan yang kurang kaya, yang dapat memengaruhi kualitas pengungkapan LKPD.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, terdapat 2 cara untuk mengetahui apakah berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara melakukan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018: 161). Jika residual terdistribusi normal, titik-titik pada plot akan membentuk garis lurus diagonal. Deviations yang signifikan dari garis ini, seperti pola melengkung atau kelompok titik yang jauh dari garis, menunjukkan potensi pelanggaran asumsi normalitas. Grafik normalitas disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4
Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Hasil analisis grafik P-P Plot menunjukkan bahwa terdistribusi normal, dengan titik-titik yang sebagian besar terletak dekat pada garis diagonal serta titik-titik ini terdistribusi merata di sekitar garis tanpa membentuk pola berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai residual mengikuti pola distribusi normal yang diharapkan, sehingga memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan dalam analisis regresi.

Uji Statistilk yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Metode ini membandingkan distribusi sampel dan distribusi normal. Jika nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari tingkat alfa yang ditentukan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data dapat dianggap terdistribusi normal. Hasil dari One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01691279
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.111
	Negative	-.140
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,057. Dengan jumlah sampel sebanyak 38, nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alfa yang digunakan (0,05). Hal ini menyatakan bahwa residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada variabel yang saling berkorelasi tinggi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
			Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.260	.191		-6.603	.000		
	IR	.275	.076	.607	3.630	.001	.181	5.528
	RKD	.572	.078	1.303	7.299	.000	.159	6.297
	KD	.010	.006	.160	1.585	.122	.495	2.019

a. Dependent Variable: PLKPD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel IR sebesar 0,181, RKD sebesar 0,159, dan KD sebesar 0,495, yang artinya nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Sedangkan variabel IR memiliki nilai VIF 5,528, RKD sebesar 6,297, dan KD sebesar 2,019, yang artinya nilai VIF tidak lebih dari 10. Maka, hasil multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari kasus multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test), yang mengukur sejauh mana nilai residual dari model regresi saat ini berkorelasi dengan nilai residual sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018: 112). Dengan melakukan uji Durbin-Watson, peneliti dapat memastikan bahwa asumsi independensi residual terpenuhi, yang penting untuk validitas dan keandalan hasil analisis regresi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.813	.017643	1.879

a. Predictors: (Constant), KD, IR , RKD

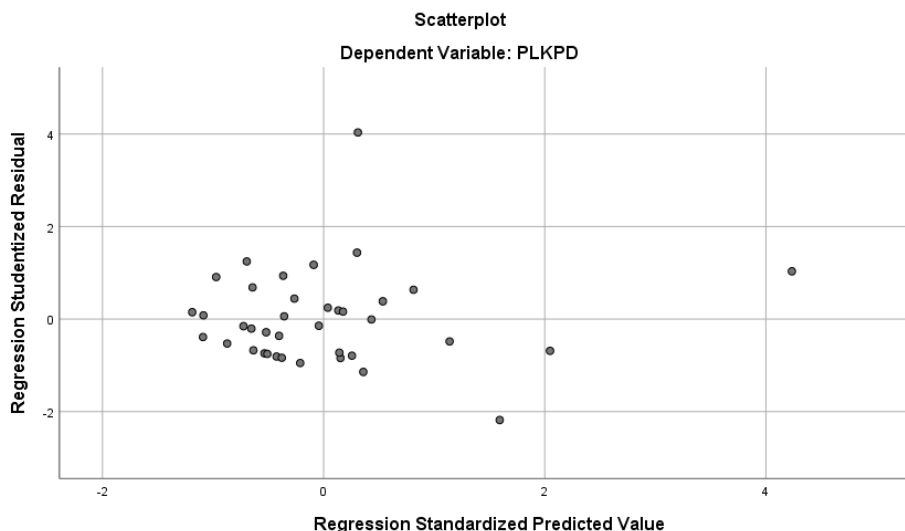
b. Dependent Variable: PLKPD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, Nilai Durbin-Watson sebesar 1,879 terletak diantara dU hingga 4-dU yang menyatakan bahwa sudah bebas dari kasus autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, menggunakan Grafik Plot antara ZPRED (nilai prediksi variabel terikat) dan SRESID (residual) sebagai cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Grafik normalitas disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Berdasarkan pada Gambar 4, dapat disimpulkan bahwa gambar Scatterplot tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik yang bergelombang, melebar kemudian menyempit, sehingga model sudah bebas dari kasus heteroskedastisitas. Selain menggunakan Scatterplot, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan Uji Glejser. Dalam suatu penelitian, dikatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai sig>0,05. Hasil dari uji glejser dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.200	.128		-1.563	.127
	IR	.043	.051	.323	.839	.407
	RKD	.023	.052	.181	.441	.662
	KD	.006	.004	.341	1.468	.151

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 6, nilai sig pada hasil uji glejser diatas menunjukkan lebih dari 0,05, yang artinya bahwa penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel *intergovernmental revenue*, rasio kemandirian daerah, dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.260	.191		-6.603	.000
	IR	.275	.076	.607	3.630	.001
	RKD	.572	.078	1.303	7.299	.000
	KD	.010	.006	.160	1.585	.122

b. Dependent Variable: PLKPD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Pada Tabel 7 dari hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi linear berganda dari hasil pengujian sebagai berikut:

$$PLKPD = -1,260 + 0,275 + 0,572 + 0,10 + e$$

Dari hasil regresi linier berganda diatas, nilai konstanta (α) pada penelitian ini adalah sebesar -1,260. Ini menggambarkan bahwa ketika semua variabel independen (*Intergovernmental Revenue*, Rasio Kemandirian Daerah, Kekayaan Daerah) bernilai nol (0), nilai variabel dependen (Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) berada pada angka negatif yaitu -1,260. (1) Koefisien untuk *intergovernmental revenue* (β_{1IR}) sebesar 0,275 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pendapatan antar pemerintah akan berpengaruh pada peningkatan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 0,275. Nilai koefisien ini bernilai positif yang artinya adanya hubungan yang searah antara variabel *intergovernmental revenue* dengan pengungkapan LKPD. Hasil ini mengindikasikan bahwa *intergovernmental revenue* berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, (2) Koefisien untuk rasio kemandirian daerah (β_{1RKD}) sebesar 0,572 menunjukkan pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan *intergovernmental revenue*. Setiap peningkatan satu unit pada rasio kemandirian

daerah berkontribusi sebesar 0,572 terhadap pengungkapan LKPD. Nilai koefisien ini bernilai positif yang artinya adanya hubungan yang searah antara variabel rasio kemandirian daerah dengan pengungkapan LKPD. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan mendorong tanggung jawab dalam pelaporan keuangan. (3) Koefisien kekayaan daerah (β_{1KD}) sebesar 0,10 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pengungkapan LKPD lebih kecil dibandingkan dengan dua variabel sebelumnya. Peningkatan satu unit dalam kekayaan daerah hanya akan meningkatkan pengungkapan LKPD sebesar 0,10. Nilai koefisien ini bernilai positif yang artinya adanya hubungan yang searah antara variabel kekayaan daerah dengan pengungkapan LKPD. Meskipun kekayaan daerah bernilai positif terhadap pengungkapan LKPD, faktor-faktor lain yang terikat dengan pengelolaan kekayaan daerah mungkin perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan transparansi dalam laporan keuangan.

Uji Kelayakan Model

Dalam penelitian ini, uji kelayakan model juga untuk mengetahui apakah model yang digunakan layak untuk diuji lebih lanjut atau tidak. Dikatakan model regresi layak untuk diuji lebih lanjut adalah jika nilai signifikan $F < 0,05$. Sebaliknya, dikatakan model regresi tidak layak untuk diuji lebih lanjut adalah jika nilai signifikansi $F > 0,05$. Hasil dari uji kelayakan model dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	.051	3	.017	54.580	.000 ^b
	<i>Residual</i>	.011	34	.000		
	<i>Total</i>	.062	37			

a. Dependent Variable: PLKPD

b. Predictors: (Constant), KD, IR, RKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Pada Tabel 8 hasil uji ANOVA, menjelaskan bahwa nilai F yang dihasilkan dari analisis adalah 54,580, dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F yang tinggi dan nilai signifikansi yang rendah ($< 0,05$) menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel independent. Dengan kata lain, variabel independen (IR, RKD, KD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (PLKPD).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu data. Nilai R² berkisar antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan model tidak menjelaskan variabilitas sama sekali, sementara nilai 1 menunjukkan model dapat menjelaskan seluruh variabilitas data. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.910 ^a	.828	.813	.017643

a. Predictors: (Constant), KD, IR, RKD

b. Dependent Variable: PLKPD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Dari hasil uji koefisien determinasi diatas, diperoreh nilai *R Square* sebesar 82,8% atau sebesar 0,828, artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 82,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 17,2% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak termasuk pada model.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu memengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi dari uji t adalah sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dikatakan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah jika nilai signifikansi uji t < 0,05. Sebaliknya, Dikatakan tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah jika nilai signifikansi uji t > 0,05. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.260	.191		-6.603	.000
	IR	.275	.076	.607	3.630	.001
	RKD	.572	.078	1.303	7.299	.000
	KD	.010	.006	.160	1.585	.122

c. Dependent Variable: PLKPD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, menunjukkan bahwa: (1) Variabel *Intergovernmental Revenue* (IR) memiliki nilai t hitung sebesar 3,630 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (IR) dan variabel dependen (PLKPD). Dapat disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD yang menunjukkan H_1 diterima, (2) Variabel Rasio Kemandirian Daerah (RKD) memiliki nilai t hitung sebesar 7,299 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (RKD) dan variabel dependen (PLKPD). Dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD yang menunjukkan H_2 diterima, (3) Variabel Kekayaan Daerah (KD) memiliki nilai t hitung sebesar 1,585 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,122 ($0,122 > 0,05$). Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen (KD) dan variabel dependen (PLKPD). Dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Nilai t hitung diperoleh sebesar 3,630 menunjukkan bahwa pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan LKPD adalah signifikan. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat berhubungan langsung dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan suatu daerah.

Intergovernmental revenue, yang merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan LKPD. Ketika pemerintah daerah memperoleh lebih banyak pendapatan dari sumber *intergovernmental*, mereka dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan ini mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih rinci dan akurat, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih memahami bagaimana dana publik digunakan.

Penelitian Setyorini (2020) mendukung hasil penelitian ini, pemerintah daerah dengan *intergovernmental revenue* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi akan menuntut pengungkapan yang cukup lengkap sebagai upaya untuk memonitor kinerja pemerintah daerah atas penggunaan dana transfer. Rafida, Abdullah, dan Yamin (2019) juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana pertanggungjawaban dana perimbangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani (2022) bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang memungkinkan dapat disebabkan oleh masih ada sumber pendapatan daerah lain yang lebih dominan memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang dapat mendukung kebutuhan dan aktivitas pemerintah daerah.

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Dengan nilai t hitung sebesar 7,299 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, semakin besar pula tingkat pengungkapan LKPD.

Rasio kemandirian daerah dan pengungkapan LKPD juga memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Rasio kemandirian daerah yang tinggi menunjukkan bahwa suatu pemerintah daerah mampu mengelola sumber pendapatan sendiri dengan lebih baik, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian yang tinggi, lebih terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Dengan meningkatkan pengungkapan LKPD, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi yang ada, tetapi juga harus membangun kepercayaan masyarakat.

Penelitian Setyorini (2020) mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Pemerintah daerah dengan kemandirian daerah yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang baik. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianti dan Herawati (2022); Suladri (2019); Putri dan Arza (2019) bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya pemerintah daerah masih bergantung pada selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari dana transfer pemerintah pusat dan pembiayaan. Masih rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah tersebut kemungkinan dapat menyebabkan pemerintah tidak begitu antusias untuk melakukan pengungkapan penuh terhadap laporan keuangannya.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Dapat dilihat dari hasil nilai t hitung sebesar 1,585 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,122, yang lebih besar dari 0,05. Ini membuktikan bahwa meskipun kekayaan daerah memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengaruhnya terhadap pengungkapan LKPD tidak cukup signifikan.

Kekayaan suatu daerah dapat memberikan lebih banyak sumber daya untuk pengelolaan keuangan. Daerah dengan tingkat kekayaan yang tinggi cenderung lebih mampu dan berkomitmen untuk menyajikan informasi keuangan secara komprehensif dan transparan. Hal ini karena adanya kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset dan sumber daya yang ada kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, tidak semua daerah harus bergantung pada aset tersebut untuk mengembangkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak daerah yang mungkin lebih bergantung pada pendapatan dari pajak, retribusi, hibah, atau dana transfer dari pemerintah pusat, yang dapat memengaruhi pengelolaan dan pengungkapan laporan keuangan mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rafida, Abdullah, dan Yamin (2019); Putri dan Arza (2019); Setyorini (2020) yang mengungkapkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar kekayaan pemerintah daerah belum tentu dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan bahwa pengelolaan aset yang kurang efektif, serta ketergantungan pada sumber pendapatan lain dapat menghambat transparansi dalam laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *intergovernmental revenue*, rasio kemandirian daerah, dan kekayaan daerah memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari situs resmi BPK RI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, dengan periode penelitian selama 1 tahun, yaitu tahun 2023. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan teknik pengambilan secara *saturation sampling* (sampel jenuh) yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Dari hasil pengujian regresi diperoleh 38 sampel yang berasal dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2023 dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* meningkatkan sumber daya yang tersedia bagi suatu pemerintah daerah, yang mendorong mereka untuk memperbaiki sistem pelaporan dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada public, (2) Rasio kemandirian daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan karena daerah yang lebih mandiri cenderung memiliki kontrol lebih besar atas pengelolaan keuangan mereka, sehingga mendorong mereka untuk bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan yang akurat dan transparan, (3) Namun, kekayaan daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tetapi tidak signifikan. Meskipun kekayaan daerah mengindikasikan potensi pendapatan yang tinggi, tidak semua daerah bergantung pada asset yang dimiliki. Banyak daerah mungkin masih bergantung pada pendapatan sumber lain, seperti pajak atau dana transfer. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan asset yang kurang efektif atau ketergantungan pada pendapatan lain dapat menghambat pengungkapan informasi yang relevan.

Saran

Di bawah ini beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya: (1) Penggunaan SAP usahakan sesuai dengan tahun penyusunan LKPD, (2) Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan penelitiannya dengan menggunakan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan, selain *intergovernmental revenue*, rasio kemandirian daerah, dan kekayaan daerah untuk mengembangkan metode penelitian, (3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. A., dan Eny, K. 2024. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Social Science Research* 4 (2): 84-95.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2023. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I*. Indonesia.
- Dianti, M. M., Herawati. 2022. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*: 21 (1).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, October, 1976*: V.3, No. 4, pp. 305-360.
- Jessica, N., dan Sugi, S. 2020. Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi* 9 (1): 14-27.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2020. *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Berbasis Akrua*.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*: 4-7.
- Putri, W. M., dan Fefri, I. A. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1 (3): 1111-30.
- Ridwan, R., Muhammad, I. A., dan Nina, Y. Y. 2019. Pengaruh Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah). *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*: 1 (2).
- Sani, F. A. 2022. Pengaruh Intergovernmental Revenue, Temuan Audit, Umur Pemerintah Daerah, Spesialisasi Pekerjaan, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Revenue Sources of Local Governments*: 214-50.
- Setyorini, S. 2020. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Pemerintah Daerah,

- Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017). *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Bisnis*: 27-41.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 2024. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S1)*. Surabaya.
- Suladri, S. R. U. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19 (2): 253-63.
- Suryantini, N. P. S., Ni Putu, A. D., dan Ica, R. C. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, no. 32, 27-28.